BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, dilakukan melalui dua perlindungan, yaitu preventif dan represif. Preventif dilakukan lewat program edukasi dan sosialisasi BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan pencegahannya. Sedangkan represif dilaksanakan dengan mekanisme sistematis mulai dari pengaduan hingga penyelesaian kasus sesuai SOP, termasuk layanan perlindungan, konseling, bantuan hukum, dan pendampingan korban. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, memastikan hak anak terpenuhi dengan adanya shelter, mediasi, serta pendampingan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Program Forum Anak Sidoarjo (FAS) dan 2P (Pelopor dan Pelapor) dijalankan sebagai bagian dari perlindungan.
2. Kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, diantaranya yaitu minimnya dukungan keluarga, perilaku korban saat proses pemulihan, keterbatasan jumlah petugas dan ruang konseling, serta kurang maksimalnya program dimasyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, memberikan motivasi dan edukasi kepada

korban dan keluarganya, menambah jumlah petugas, bekerja sama dengan pihak terkait, menyediakan layanan konseling diberbagai platform, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Penanganan difokuskan pada kebutuhan korban untuk memastikan perlindungan, pemulihan, serta keadilan yang maksimal.

4.2 Saran

1. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus, serta pelatihan keberlanjutan bagi petugas UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo agar mampu memberikan layanan yang optimal. Selain itu, perlu disusun sistem pembagian tugas yang terstruktur dalam menangani korban. Disamping itu, diperlukan penambahan alokasi anggaran untuk mendukung program perlindungan dan pemulihan korban.
2. Perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Masyarakat harus didorong lebih proaktif dalam melaporkan kasus yang terjadi dilingkungan sekitar mereka.